

PEMERINTAH KOTA SURABAYA



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

RSUD dr. MOHAMAD SOEWANDHIE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai acuan pembangunan dalam periode satu tahun.

Semoga Dokumen Rencana Kerja Perubahan RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman (*guideline*) dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan guna mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	4
I.3 Maksud dan Tujuan	8
I.4 Sistematika Penulisan	9
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I	10
II.2 Analisis Kinerja	13
 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA	
III.1 Rencana Program dan kegiatan	26
III.2 Analisis Program dan Kegiatan	29
 BAB IV PENUTUP	30

BAB I.

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penyusunan Rankhir Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan yang disusun dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra RSUD dr. Mohamad Soewandhie, dan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan RSUD dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya tahun 2025 disusun berpedoman pada :

1. Perubahan Renstra RSUD dr. Mohamad Soewandhie Tahun 2021-2026
2. Perubahan Kedua Renstra RSUD dr. Mohamad Soewandhie Tahun 2021-2026
3. RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026
4. Evaluasi evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

I.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Bab 1 ketentuan umum pasal 1 dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

I.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Bagian kesatu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah berorientasi pada Proses dan orientasi Substansi.

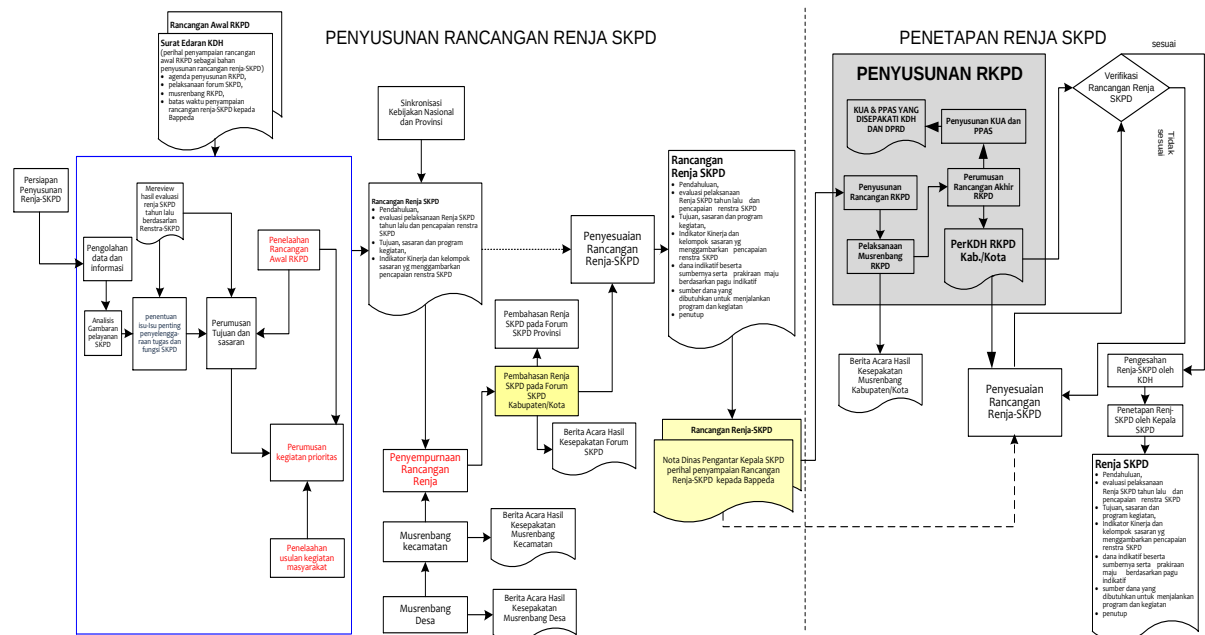
Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada Proses, menggunakan pendekatan :

- a. **Pendekatan teknokratik** dalam perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- b. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. **Pendekatan politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD
- d. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada Substansi, menggunakan pendekatan :

- a. **Pendekatan holistik-tematik** dalam perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- b. **Pendekatan integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- c. **Pendekatan spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah.



Gambar 1.1 Alur Penyusunan Renja PD

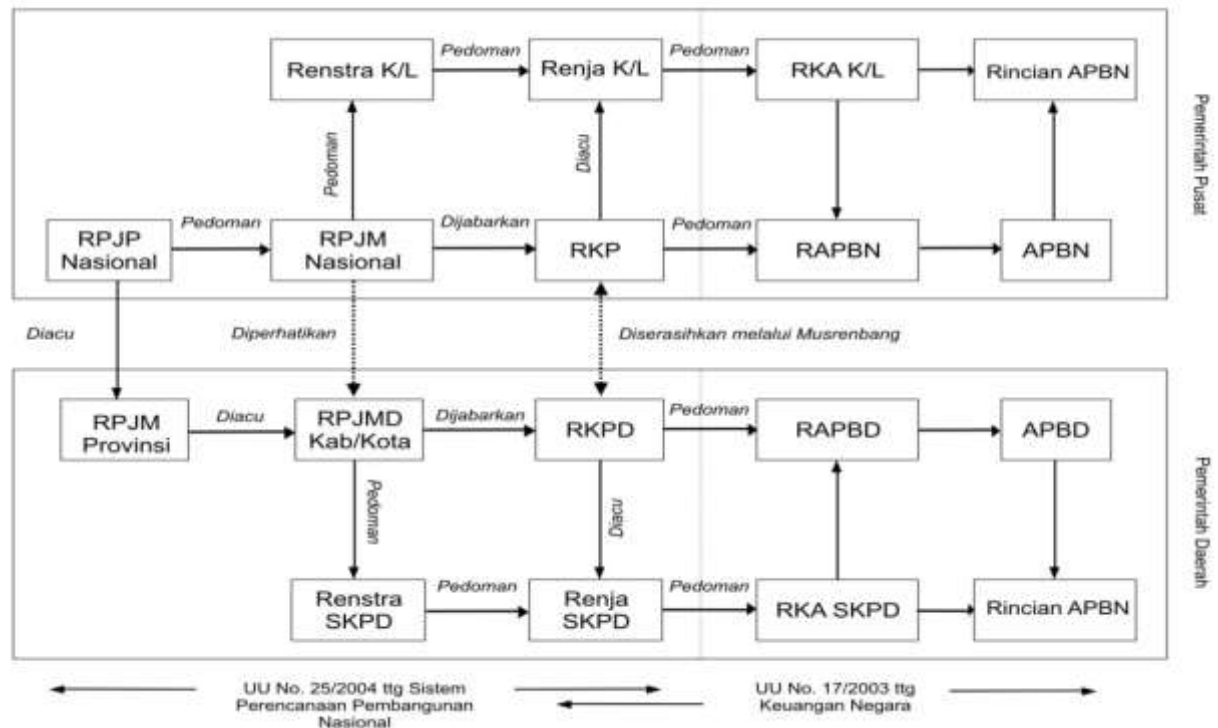
I.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dokumen Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Keterkaitan tersebut dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Dokumen Perencanaan di tingkat Pemerintahan Pusat diacu, diperhatikan, dan diserasikan melalui Musrenbang pada tingkat Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Renja RSUD dr. Mohamad Soewandhie tahun 2026 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJMD Kota Surabaya tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif,

lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, berdasarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang ada pada Rancangan RKPD



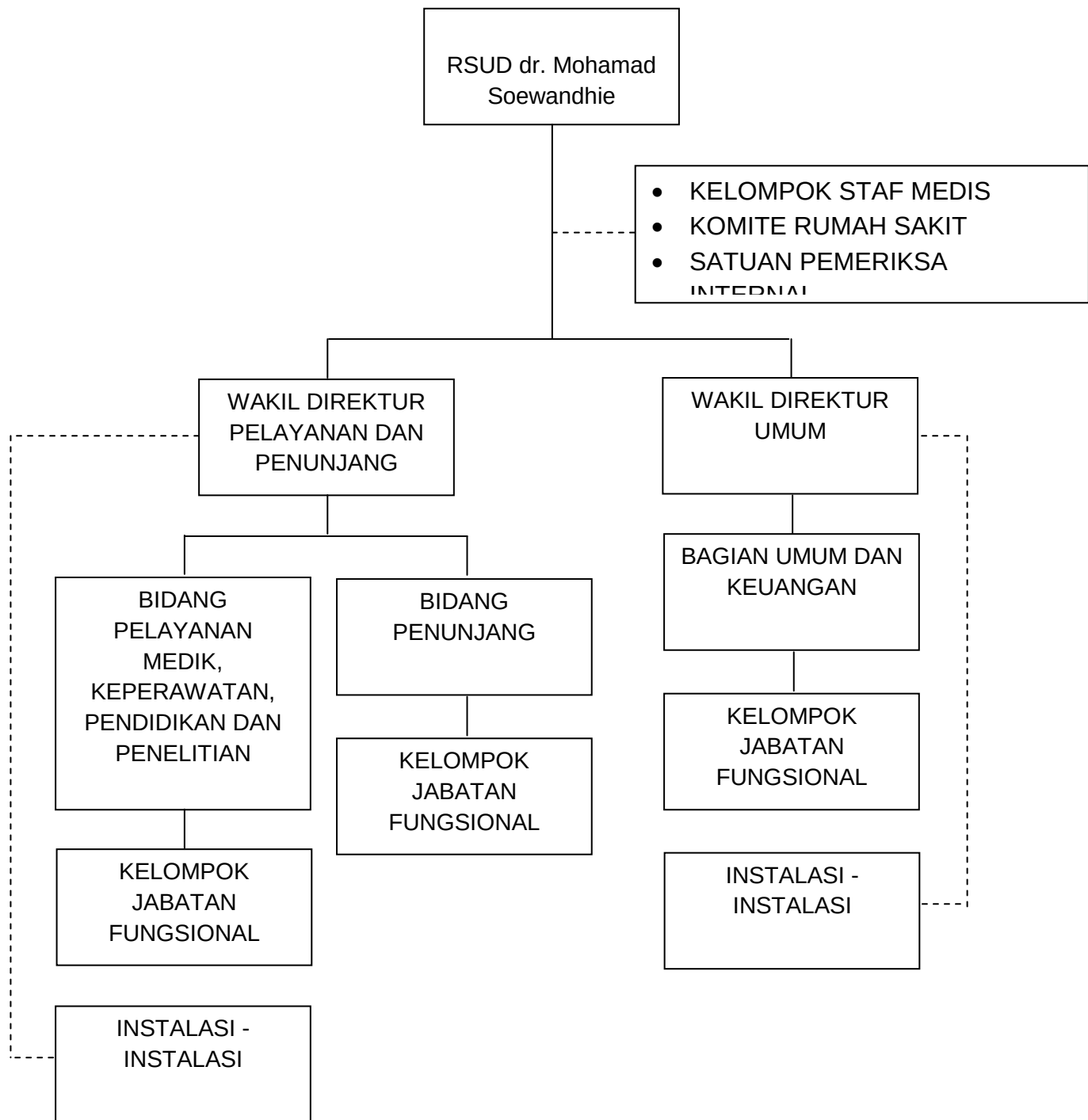
Gambar 1. 2

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

I.2. Landasan Hukum

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja RSUD dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya. Dalam Peraturan Walikota tersebut diatur Struktur Organisasi RSUD dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Rumah Sakit RSUD dr. Mohamad Soewandhie

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2021, mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disusun dalam tahapan

- a. Persiapan penyusunan RKPD;
- b. Penyusunan Rancangan RKPD;
- c. Penyusunan rancangan RKPD;
- d. Pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD, dan;
- f. Penetapan RKPD.

Sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan

- a. Persiapan penyusunan ;
- b. Penyusunan Rancangan ;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum PD/Lintas PD;
- e. Perumusan rancangan akhir;
- f. Penetapan.

Adapun landasan hukum yang memayungi dalam perencanaan dan penganggaran, adalah sebagai berikut:

Peraturan yang memayungi Perencanaan dan Penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.51317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya

16. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025;
19. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/365/436.1.2/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud Penyusunan Renja RSUD dr. Mohamad Soewandhie

Maksud penyusunan Renja:

1. Menjabarkan rencana strategis kota ke dalam rencana strategis RSUD dr. Mohamad Soewandhie jangka pendek (1 tahun);
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan RSUD dr. Mohamad Soewandhie, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
3. Sebagai perencanaan pada unit organisasi terendah di pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Rencana Strategis, dan RPJMD.

I.3.2 Tujuan Penyusunan Renja RSUD dr. Mohamad Soewandhie

Tujuan penyusunan Renja:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan RSUD dr. Mohamad Soewandhie dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2025 RSUD dr. Mohamad Soewandhie adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2025

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

Bab ini berisikan penjelasan mengenai :

- 3.1 Rencana Program dan Kegiatan
- 3.1 Analisa Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAHTAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I

Penyusunan Renja Perubahan RSUD dr. Mohamad Soewandhie berdasarkan Perubahan RKPD Kota Surabaya. Pelaksanaan Renja tahun 2025 berdasarkan indikator Program dan Kegiatan dari Renstra RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

Berikut ini ditampilkan tabel capaian kinerja Renja tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian Renstra SKPD

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Mohamad Soewandhie sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%								
1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																			
1.02		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																			
1.02.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		448,044,542	373,535,030	425,548,909	26,176,261	-	-	-	26,176,261	26,176,261	5,84%								
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan [514]	88 %	91.22 %	87.95 %	91.44 %	-	-	-	91.44 %	91.44 %	103.91%								
			Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target [1261]	83 %	88.89 %	82.95 %	88.89 %	-	-	-	88.89 %	88.89 %	107.10%								
1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		71,091,174		127,934,243	25,788,261	-	-	-	25,788,261	25,788,261	36.27%								
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [155]	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	100.00%								
1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [336]		71,091,174		127,934,243	25,788,261	-	-	-	25,788,261	25,788,261	36.27%								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [5699]	450 Orang/bulan	809 Orang/bulan	811 Orang/bulan	804 Orang/bulan	-	-	-	804 Orang/bulan	804 Orang/bulan	178.67%								
1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		72,073,629		1,798,494	388,000	-	-	-	388,000	388,000	0.54%								
			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah [619]	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	100.00%								
1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [360]		72,073,629		1,798,494	388,000	-	-	-	388,000	388,000	0.54%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [5700]	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	-	-	-	3 Laporan	3 Laporan	25.00%								
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		304,879,739		295,816,172	0	-	-	-	0	0	0.00%								
			Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi [1579]	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	100.00%								
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [3021]		304,879,739		295,816,172	0	-	-	-	0	0	0.00%								
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan [5701]	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	-	-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100.00%								
1.02.02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		1,772,987	49,642	1,432,448	8,400	-	-	-	8,400	8,400	0.47%								
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit [1270]	98.08 %	100.00 %	98.08 %	100.00 %	-	-	-	100.00 %	100.00 %	101.96%								
1.02.02.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1,772,987		1,432,448	8,400	-	-	-	8,400	8,400	0.47%								
			Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Mohamad Soewandhie [1587]	100 %	100 %	100 %	0 %	-	-	-	0 %	0 %	0.00%								
1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan [329]		1,772,987		1,432,448	8,400	-	-	-	8,400	8,400	0.47%								
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan [5698]	1 Unit	3 Unit	1 Unit	0 Unit	-	-	-	0 Unit	0 Unit	0.00%								

Program dan Kegiatan tahun 2026 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah . Program dan Kegiatan tahun 2025 beserta indikator dan target, berdasarkan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Mohamad Soewandhie

Indikator Kinerja adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan penetapan indikator Kinerja Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Realisasi target Program pada Triwulan 1 2025 belum dapat dihitung karena realisasi target Program akumulasi kinerja 1 tahun. Realisasi target sub kegiatan Triwulan 1, merupakan kinerja sampai dengan bulan Februari, karena penyusunan Rancangan Perubahan Renja 2025 pada bulan Maret. Target output sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, perlu disesuaikan karena ada mutasi ASN ke RSUD Eka Candrarini dan terdapat PPPK yang mengundurkan diri, namun belum diproses SK Walikota pemberhentiannya

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Mohamad Soewandhie Tahun 2024 (Tabel TC.30)

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	60%		79,00%	79,20%	79,50%	80%	80,14%	79,22%	83,25%	85,93%	
2	Nilai SAKIP RSUD dr. Mohamad Soewandhie	70		83,5	83,61	83,71	83,81	93,39	93,93	92,15	93,25	
3	Hasil Penilaian Akreditasi RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	

Upaya RSUD dr. Mohamad Soewandhie dalam memenuhi Indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian SPM RSUD dr. Mohamad Soewandhie

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM-RS	STANDAR PERMENKES 129 / 2008	CAPAIAN INDIKATOR	HASIL
GAWAT DARURAT	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%	Tercapai
GAWAT DARURAT	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	24 Jam	Tercapai
GAWAT DARURAT	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%	100%	Tercapai
GAWAT DARURAT	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim	Satu tim	Tercapai
GAWAT DARURAT	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang	1 menit 19 detik	Tercapai
GAWAT DARURAT	Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %	97,30%	Tercapai
GAWAT DARURAT	Kematian pasien < 24 Jam	≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	0,002	Tercapai
GAWAT DARURAT	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	Tercapai
RAWAT JALAN	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis	100%	Tercapai

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM-RS	STANDAR PERMENKES 129 / 2008	CAPAIAN INDIKATOR	HASIL
RAWAT JALAN	Ketersediaan Pelayanan	a. Klinik Anak b. Klinik Penyakit dalam c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah	100%	Tercapai
RAWAT JALAN	Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 - 11.00	100%	Tercapai
RAWAT JALAN	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	52 menit 29 detik	Tercapai
RAWAT JALAN	Kepuasan Pelanggan	≥ 90 %	90,02%	Tercapai
RAWAT JALAN	Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%	Tercapai
RAWAT JALAN	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	≥ 60 %	100%	Tercapai
RAWAT JALAN	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60 %	100%	Tercapai
RAWAT INAP	Pemberi pelayanan di Rawat Inap	a. dr. Spesialis b. Perawat minimal pendidikan D3	100%	Tercapai
RAWAT INAP	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	Tercapai
RAWAT INAP	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah	100%	Tercapai
RAWAT INAP	Jam visite dokter spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	100%	Tercapai
RAWAT INAP	Kejadian infeksi pasca	≤ 1,5 %	0,27%	Tercapai

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM-RS	STANDAR PERMENKES 129 / 2008	CAPAIAN INDIKATOR	HASIL
	operasi			
RAWAT INAP	Kejadian Infeksi Nosokomial	$\leq 1,5 \%$	0,13%	Tercapai
RAWAT INAP	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan	100%	100%	Tercapai
RAWAT INAP	Kematian pasien > 48 jam	0,24%	1,92%	Tidak Tercapai
RAWAT INAP	Kejadian pulang paksa	$\leq 5 \%$	1,25%	Tercapai
RAWAT INAP	Kepuasan pelanggan	$\geq 90 \%$	89,23%	Tidak Tercapai
RAWAT INAP	Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%	Tercapai
RAWAT INAP	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	$\geq 60 \%$	100%	Tercapai
RAWAT INAP	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	b. $\geq 60 \%$	100%	Tercapai
RAWAT INAP	Ketersediaan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa	NAPZA, Gangguan Psikotik, Gangguan Nerotik, dan Gangguan Mental Organik	100%	Tercapai
RAWAT INAP	Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri	100%	100%	Tercapai

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM-RS	STANDAR PERMENKES 129 / 2008	CAPAIAN INDIKATOR	HASIL
RAWAT INAP	Kejadian (re-admision) pasien gangguan jiwa tidak kembali dalam perawatan dalam waktu ≤ 1 bulan	100%	100%	Tercapai
RAWAT INAP	Lama hari perawatan Pasien gangguan jiwa	≤ 6 minggu	5 Hari	Tercapai
BEDAH SENTRAL	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	1 hari	Tercapai
BEDAH SENTRAL	Kejadian Kematian di meja operasi	$\leq 1 \%$	0%	Tercapai
BEDAH SENTRAL	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	Tercapai
BEDAH SENTRAL	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	Tercapai
BEDAH SENTRAL	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	Tercapai
BEDAH SENTRAL	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	Tercapai
BEDAH SENTRAL	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	$\leq 6 \%$	0%	Tercapai
PERSALINAN DAN PERINATOLOGI (KECUALI RUMAH SAKIT KHUSUS DI LUAR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK	Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan $\leq 1 \%$ b. Pre-eklampsia $\leq 30 \%$ c. Sepsis $\leq 0,2 \%$	a. 0% b. 0% c. 0%	Tercapai

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM-RS	STANDAR PERMENKES 129 / 2008	CAPAIAN INDIKATOR	HASIL
PERSALINAN DAN PERINATOLOGI (KECUALI RUMAH SAKIT KHUSUS DI LUAR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK	Pemberi pelayanan persalinan normal	a. Dokter Sp.OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan	100%	Tercapai
PERSALINAN DAN PERINATOLOGI (KECUALI RUMAH SAKIT KHUSUS DI LUAR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih	100%	Tercapai
PERSALINAN DAN PERINATOLOGI (KECUALI RUMAH SAKIT KHUSUS DI LUAR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	a. Dokter Sp.OG b. Dokter Sp.A c. Dokter Sp.An	100%	Tercapai
PERSALINAN DAN PERINATOLOGI (KECUALI RUMAH SAKIT KHUSUS DI LUAR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	100%	Tercapai
PERSALINAN DAN PERINATOLOGI (KECUALI RUMAH SAKIT KHUSUS DI LUAR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %	36,94%	Tidak Tercapai

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM-RS	STANDAR PERMENKES 129 / 2008	CAPAIAN INDIKATOR	HASIL
PERSALINAN DAN PERINATOLOGI (KECUALI RUMAH SAKIT KHUSUS DI LUAR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK	Keluarga Berencana	a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum terlatih '100% b. Presentse peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih '100%	a. 100% b. 100%	Tercapai
PERSALINAN DAN PERINATOLOGI (KECUALI RUMAH SAKIT KHUSUS DI LUAR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	89%	Tercapai
PELAYANAN INTENSIVE	Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	2%	Tercapai
PELAYANAN INTENSIVE	Pemberi pelayanan Unit Intensif a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani b. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)	100%	86,49%	Tidak Tercapai
RADIOLOGI	Waktu tunggu hasil	≤ 3 jam	8 jam 18	Tidak

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM-RS	STANDAR PERMENKES 129 / 2008	CAPAIAN INDIKATOR	HASIL
	pelayanan thorax foto		menit	Tercapai
RADIOLOGI	pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.Rad	100%	Tercapai
RADIOLOGI	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan foto $\leq 2 \%$	1,005%	Tercapai
RADIOLOGI	Kepuasan pelanggan	$\geq 80 \%$	89%	Tercapai
LABORATORIUM	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium.	≤ 140 menit Kimia darah & darah rutin	49 menit	Tercapai
LABORATORIUM	Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.PK	100%	Tercapai
LABORATORIUM	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	100%	100%	Tercapai
LABORATORIUM	Kepuasan pelanggan	$\geq 80 \%$	89%	Tercapai
REHABILITASI MEDIK (IRJ)	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang di rencanakan	$\leq 50 \%$	0%	Tercapai
REHABILITASI MEDIK (IRJ)	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	Tercapai
REHABILITASI MEDIK (IRJ)	Kepuasan Pelanggan	$\geq 80 \%$	88,04%	Tercapai
FARMASI	waktu tunggu pelayanan Obat Jadi	a. ≤ 30 menit	17 menit	Tercapai
FARMASI	waktu tunggu pelayanan Racikan	b. ≤ 60 menit	29 menit	Tercapai
FARMASI	Tidak adanya Kejadian kesalahan pernberian obat	100%	100%	Tercapai
FARMASI	Kepuasan pelanggan	$\geq 80 \%$	96,10%	Tercapai

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM-RS	STANDAR PERMENKES 129 / 2008	CAPAIAN INDIKATOR	HASIL
FARMASI	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	Tercapai
Instalasi Gizi	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	$\geq 90 \%$	98,90%	Tercapai
Instalasi Gizi	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	$\leq 20 \%$	10,44%	Tercapai
Instalasi Gizi	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	99,98%	Tidak Tercapai
TRANSFUSI DARAH	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100 % terpenuhi	100%	Tercapai
TRANSFUSI DARAH	Kejadian Reaksi transfusi	$\leq 0,01 \%$	0,66%	Tidak Tercapai
PELAYANAN GAKIN	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani	100%	Tercapai
REKAM MEDIK	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	11,10%	Tidak Tercapai
REKAM MEDIK	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	92%	Tidak Tercapai
REKAM MEDIK	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	6 menit	Tercapai
REKAM MEDIK	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	3 menit	Tercapai

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM-RS	STANDAR PERMENKES 129 / 2008	CAPAIAN INDIKATOR	HASIL
INSTALASI PENYEHTAN LINGKUNGAN	Baku mutu limbah cair	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	a. BOD < 23,03 mg/l b. COD < 61,5 mg/l c. TSS < 15,07 mg/l d. PH 7,37	Tercapai
INSTALASI PENYEHTAN LINGKUNGAN	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	97,97%	Tidak Tercapai
Administrasi dan Manajemen	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	Tercapai
Administrasi dan Manajemen	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	Tercapai
Administrasi dan Manajemen	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	Tercapai
Administrasi dan Manajemen	Ketepatan Waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	Tercapai
Administrasi dan Manajemen	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	28,2%	Tidak Tercapai
Administrasi dan Manajemen	Cost recovery	≥ 40 %	100,35%	Tercapai
Administrasi dan Manajemen	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	Tercapai
Administrasi dan Manajemen	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	20 menit	Tercapai

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM-RS	STANDAR PERMENKES 129 / 2008	CAPAIAN INDIKATOR	HASIL
Administrasi dan Manajemen	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	Tercapai
AMBULANCE/KERETA JENAZAH	Waktu pelayanan ambulance/Kereta jenazah	24 jam	24 jam	Tercapai
AMBULANCE/KERETA JENAZAH	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/Kereta jenazah di rumah sakit	≤ 30menit	100%	Tercapai
AMBULANCE/KERETA JENAZAH	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan (Ambulan NETS)	90 menit	100%	Tercapai
PEMULASARAAN JENAZAH	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 Jam	100%	Tercapai
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80%	89%	Tercapai
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	96%	Tidak Tercapai
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	96%	Tidak Tercapai
Instalasi Laundry	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	Tercapai

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM-RS	STANDAR PERMENKES 129 / 2008	CAPAIAN INDIKATOR	HASIL
Instalasi Laundry	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	Tercapai
PENCEGAHAN PENGENDALIAN INFEKSI	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %	91%	Tercapai
PENCEGAHAN PENGENDALIAN INFEKSI	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60%	100%	Tercapai
PENCEGAHAN PENGENDALIAN INFEKSI	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	75%	100%	Tercapai

Dari tabel Capaian SPM RSUD dr. Mohamad Soewandhie Tahun 2024 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pelayanan yang memenuhi SPM yaitu 88 indikator dari 99 indikator yang dipersyaratkan. Sehingga capaian pemenuhan SPM RSUD dr. Mohamad Soewandhie Tahun 2024 sebesar 88,89%.

BAB III

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

DALAM PERUBAHAN RENJA

III.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.51317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja operasional (barang dan jasa) serta belanja modal. Rencana Program dan Kegiatan dalam Rancangan Perubahan Renja RSUD dr. Mohamad Soewandhie memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran anggaran kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan, sebagaimana tercantum pada tabel berikut

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
RSUD dr. Mohamad Soewandhie
Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	82,95 %	425,548,909,013	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	82,95 %	435,771,286,580	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87,95 %				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87,95 %		
	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	127,934,242,602	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	138,347,114,605	
	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	811 Orang/bulan	127,934,242,602	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	811 Orang/bulan	138,347,114,605	
	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,798,494,436	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,608,000,000	
	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,798,494,436	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,608,000,000	
	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	100 %	295,816,171,975	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	100 %	295,816,171,975	
	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	295,816,171,975	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	295,816,171,975	
2	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98,08 %	1,432,448,450	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98,08 %	1,617,021,674	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Mohamad Soewandhie	100 %	1,432,448,450	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Mohamad Soewandhie	100 %	1,617,021,674	
	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1,432,448,450	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	1,617,021,674	

III.2 Analisa Program dan Kegiatan

Dari tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa rencana program dan kegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 mengalami perubahan Perubahan pagu indikatif pada kegiatan dan sub kegiatan.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, perubahan pagu untuk penambahan tenaga ASN
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, perubahan pagu karena tenaga Honorer Daerah dialihkan menjadi Tenaga Non ASN di sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
3. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan karena pergeseran anggaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan didanai dari DAU Earmark Bidang Kesehatan

Program dan Kegiatan pada Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024 telah sesuai dengan Perubahan RKPD Kota Surabaya

Program dan Kegiatan pada Rancangan Perubahan Renja 2025 telah sesuai dengan Rancangan Perubahan RKPD Kota Surabaya

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 meliputi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah, dana indikatif beserta sumbernya untuk menjalankan Program dan Kegiatan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Tahun 2025 ini, maka diharapkan:

1. Dapat menyelesaikan salah satu kewajiban Pemerintah Kota dalam mensejahterakan masyarakat melalui bidang kesehatan;
2. Kegiatan pelayanan kesehatan pada tahun yang akan datang dapat lebih terarah dan terencana;
3. Dengan rencana kerja SKPD dapat dipakai sebagai evaluasi kinerja SKPD tahun berjalan;
4. Dapat meningkatkan kemampuan Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya warga Kota Surabaya, sehingga Visi dan Misi Kota Surabaya dapat terwujud.

Surabaya , Agustus 2025


Direktur
dr. Billy Daniel Messakh, Sp.B
Pemula Utama Muda
NIP 196801012000121014